



KEMENTERIAN INVESTASI
DAN HILIRISASI/BKPM



Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) Tahun 2025

**Deputi Bidang Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal**



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR BAGAN, DIAGRAM, GRAFIK.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
KATA PENGANTAR.....	1
I. PENDAHULUAN.....	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Maksud dan Tujuan.....	4
3. Aspek Strategis.....	4
4. Isu Strategis.....	5
5. Tugas dan Fungsi.....	6
6. Struktur Organisasi.....	7
7. Sistematika Penyajian.....	8
II. PERENCANAAN KINERJA.....	10
1. RPJMN 2025 - 2029.....	10
2. Rencana Strategis 2025 - 2029.....	10
3. Perjanjian Kinerja.....	11
III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
1. Pengukuran Capaian Kinerja.....	13
2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	22
3. Akuntabilitas Keuangan.....	37
4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	
IV. PENUTUP.....	40
1. Kesimpulan dan Saran.....	40
2. Tindak Lanjut ke Depan.....	41
LAMPIRAN.....	

DAFTAR BAGAN, DIAGRAM, GRAFIK

Bagan 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	7
Grafik 1. Tren Realisasi Investasi Berdasarkan Subsektor Tahun 2021-2025.....	15
Grafik 2. Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2025.....	25
Grafik 3. Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2021 - 2025.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	12
Tabel 2. Kategori Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024.....	13
Tabel 3. Capaian Kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025	13
Tabel 4 .Capaian Kinerja Direktorat Wilayah I Tahun 2025.....	15
Tabel 5. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah II Tahun 2025.....	16
Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah III Tahun 2025.....	18
Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah IV Tahun 2025	19
Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah V Tahun 2025	21
Tabel 9. Target dan Realisasi PMA dan PMDN Investasi Per-Provinsi Tahun 2025	23
Tabel 10. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko	27
Tabel 11. Fasilitas Perusahaan yang dapat terselesaikan Permasalahannya.....	28
Tabel 12. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	30
Tabel 13. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	31
Tabel 14. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	32
Tabel 15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	34
Tabel 16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	35
Tabel 17. Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.....	36
Tabel 18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	38

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi'l'alamin*, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) 2025 secara tepat waktu. LKj Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal disusun dalam rangka pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan pencapaian tujuan/sasaran strategis Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Penyusunan LKj ini merupakan wujud pertanggungjawaban yang wajib dibuat oleh setiap instansi pemerintah atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditandatangani pada awal tahun. Hal ini sesuai dengan amanah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Mengacu pada peraturan tersebut, maka Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal perlu menyusun laporan kinerja yang berisi capaian atas target dan sasaran strategis yang telah digariskan dalam Perjanjian Kinerja (Perkin). LKj 2025 disajikan dengan membandingkan antara realisasi capaian kinerja seluruh direktorat yang berada dibawah unit kerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Dalam hal ini, Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari 5 (lima) Direktorat yaitu:

1. Direktorat Wilayah I, meliputi Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung (7 Provinsi).
2. Direktorat Wilayah II, meliputi Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah (7 Provinsi).
3. Direktorat Wilayah III, meliputi Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara (7 Provinsi).
4. Direktorat Wilayah IV, Provinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan (10 Provinsi).
5. Direktorat Wilayah V, meliputi Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya (7 Provinsi).

Seluruh program yang dilakukan selama periode 2025 dirangkum dalam sebuah laporan yang mendeskripsikan secara detail mengenai penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Berdasarkan LKj tersebut diharapkan adanya optimalisasi dalam peningkatan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada tahun-tahun berikutnya, sehingga dapat mewujudkan *Good*

Governance dan Clean Government.

Kami mengharapkan kiranya LKj 2025 ini dapat menjadi media transparansi dan pertanggungjawaban yang bermanfaat bagi semua pihak serta sebagai sarana evaluasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja Kedeputian Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Jakarta, 31 Januari 2026

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Edy Junaedi

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik disebutkan bahwa akuntabilitas sebagai salah satu unsur good governance. Akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj).

Laporan Kinerja Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang penanaman modal. Laporan ini merupakan wujud komitmen Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja.

Sebagai unit kerja yang memiliki peran strategis dalam pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berupaya memastikan bahwa kegiatan penanaman modal berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sejalan dengan kebijakan dan sasaran strategis pemerintah. Pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 diarahkan untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, memperkuat sistem pengendalian, serta mendorong iklim investasi yang kondusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Laporan kinerja ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai capaian kinerja Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025, meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, capaian indikator kinerja, serta evaluasi atas keberhasilan dan tantangan yang dihadapi. Diharapkan laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian penanaman modal di masa yang akan datang, sekaligus memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan.

Dalam rangka mewujudkan terciptanya pertumbuhan ekonomi yang ditunjukan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) yang positif dan berkembangnya daya saing Indonesia sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki tugas dan tanggung jawab untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di berbagai sektor perekonomian di Indonesia.

Selanjutnya, dalam menjalankan program strategis yang telah dicanangkan tahun 2025, unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mengacu pada Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 - 2029. Dalam Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025 - 2029 dijabarkan mengenai target dan indikator sasaran yang

diperinci per tahun beserta rencana alokasi pembiayaannya sebagai penjabaran dari target RPJMN Tahun 2025 - 2029.

Sesuai dengan Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025 - 2029 terdapat sasaran dan target Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM antara lain terjaganya stabilitas ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, stabilitas politik dan keamanan, masuknya Indonesia dalam peringkat investment grade. Meskipun ditengah dinamika politik dalam negeri dan ketidakpastian global, namun hal tersebut tidak menghentikan langkah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM untuk tetap mengusahakan peningkatan pencapaian realisasi investasi sesuai target yang ditetapkan.

Selama periode tahun 2025 Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal telah banyak melaksanakan program dan kegiatan untuk meningkatkan realisasi penanaman modal di Indonesia yang menggunakan anggaran APBN, sehingga dituntut untuk mempertanggungjawabkan kinerja terhadap *stakeholders*.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai Unit Eselon I, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM diwajibkan untuk:

- a. Menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj) pada setiap akhir tahun;
- b. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Oleh karena itu, diperlukan penyusunan LKj 2025 sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap penggunaan anggaran dan wewenang yang telah diberikan.

2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan LKj 2025 unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal bertujuan untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dan pengelolaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dan program kerja untuk mencapai sasaran sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja (Perkin) 2025.

Adapun tujuan penyusunan LKj ini adalah untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi capaian kinerja atas target Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Selanjutnya atas dasar hasil evaluasi kinerja atas target tersebut dapat diformulasikan suatu rekomendasi bagi unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas pelaksanaan program kerja di periode mendatang sehingga capaian kinerja dapat ditingkatkan dan lebih tepat sasaran.

3. Aspek Strategis

Dalam rangka mewujudkan tercapainya Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dirumuskan arah kebijakan dan strategi yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata;
2. Meningkatkan kualitas iklim dan kerja sama penanaman modal untuk mendukung kepastian berusaha dan daya tarik penanaman modal;
3. Meningkatkan efektivitas tata kelola penanaman modal untuk memperkuat reformasi birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.

Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berperan dalam mewujudkan Arah Kebijakan I: Akselerasi peningkatan penanaman modal yang berfokus pada sektor prioritas penanaman modal dan hilirisasi investasi strategis guna mewujudkan pencapaian nilai realisasi penanaman modal yang bernilai tambah, inklusif, berorientasi ekspor, dan merata.

Strategi Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk melaksanakan Arah Kebijakan I adalah dengan meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal, melalui:

- a. Fasilitasi permasalahan investasi termasuk pelaku usaha (debottlenecking). Debottlenecking permasalahan investasi di antaranya terkait permasalahan: (i) persetujuan pelepasan kawasan hutan; (ii) permasalahan tumpang tindih lahan; (iii) abnormality penyaluran gas; (iv) permasalahan proses AMDAL; dan (v) fasilitasi atas masyarakat sekitar yang terdampak dari pengembangan proyek prioritas.
- b. Percepatan realisasi penanaman modal Proyek Strategis Nasional (PSN).
- c. Pengawasan penanaman modal berbasis risiko.
- d. Mengoptimalkan pendataan, pengawasan, dan pembinaan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan/atau melaporkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).
- e. Mengawal eksekusi dan fasilitasi proyek untuk mendukung percepatan realisasi investasi.

4. Isu Strategis

Beberapa isu strategis yang mempengaruhi pencapaian target kinerja antara lain:

- a. Masih diperlukannya tambahan Sumber Daya Manusia dalam mendukung kapasitas pekerjaan yang semakin beragam;
- b. Masih diperlukannya koordinasi tingkat Kementerian/Lembaga Teknis dalam pelaksanaan kegiatan lingkup Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- c. Dukungan ketersediaan anggaran dalam pencapaian target program dan kegiatan
- d. Sarana penunjang perkantoran yang belum memadai baik Laptop/PC.

5. Tugas dan Fungsi

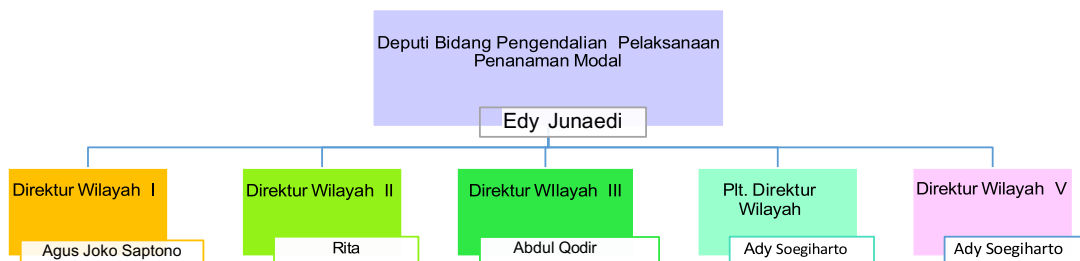
Unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Selain itu, unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memiliki fungsi :

1. Koordinasi perumusan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
2. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
3. Pembinaan pelaksanaan penanaman modal, pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanaman modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;
4. Fasilitasi persebaran penanaman modal di seluruh Indonesia dan penyelesaian permasalahan dan kendala pelaku usaha;
5. Koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berbasis risiko dan pelaksanaan pengawasan administratif dan/atau fisik realisasi penanaman modal;
6. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
8. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

6. Struktur Organisasi

Bagan 1. Struktur Organisasi Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal



Pada setiap Direktorat Wilayah memiliki kewenangan dalam menangani bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal pada provinsi tertentu. Wilayah kerja masing-masing direktorat meliputi :

1. Direktorat Wilayah I meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung;
2. Direktorat Wilayah II meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
3. Direktorat Wilayah III meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara;
4. Direktorat Wilayah IV meliputi 10 provinsi, yaitu Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan.
5. Direktorat Wilayah V meliputi 7 provinsi, yaitu Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya.
6. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
 - a) penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b) pelaksanaan urusan keuangan;
 - c) pelaksanaan urusan ketatausahaan, sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, kearsipan, serta kerumahtanggaan; dan
 - d) penyiapan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

7. Sistematika Penyajian

LKj disajikan dengan sarana yang dapat mendeskripsikan kegiatan dan pelaksanaan program unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal selama periode 2025, sehingga berbagai pemangku kepentingan dapat lebih mudah memahami tentang capaian kinerja selama masa kerja tersebut. Dalam hal ini Perkin 2025 menjadi rujukan dan tolok ukur atas keberhasilan unit Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan gambaran tentang capaian kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai wujud (entitas) akuntabilitas kinerja unit organisasi Eselon I selama Tahun 2025. Capaian Kinerja diperoleh berdasarkan perbandingan capaian realisasi kinerja dengan target kinerja, dimana target kinerja merupakan Perjanjian Kinerja yang disampaikan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Capaian Kinerja Tahun 2025 merupakan tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Analisis capaian realisasi kinerja dengan rencana target kinerja tersebut dapat menghasilkan sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025 ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Intstansi Pemerintah. Dalam Peraturan tersebut, isi LKj digariskan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issue*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2025;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2025;
3. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM

Tahun 2025 - 2029.

4. Membandingkan realisasi kinerja Tahun 2025 dengan standar nasional (jika ada)
 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.
- b. Realisasi Anggaran
- Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. **Bab IV Penutup**

Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerjanya.

5. **Lampiran**

II. PERENCANAAN KINERJA

Tahap perencanaan merupakan proses yang menjadi kunci penentu keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan termasuk didalamnya kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebagai salah satu unit kerja pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, dalam melakukan kegiatan yang merupakan pelaksanaan dari tugas dan fungsinya berpedoman pada dokumen perencanaan sebagai berikut:

1. RPJMN 2025 - 2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 - 2029 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 - 2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Sesuai arahan RPJPN, sasaran pembangunan jangka menengah 2025 - 2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang di dukung sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Bentuk dukungan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden 2025 - 2029 yaitu: "Terwujudnya Penanaman Modal Yang Tinggi dan Berkualitas untuk Menuju Indonesia Emas 2045".

**Visi Indonesia : "Bersama
Indonesia Maju,,
Menuju Indonesia Emas
2045"**

2. Rencana Strategis 2025 - 2029

RPJMN Tahun 2025 - 2029 menetapkan 5 (lima) sasaran pembangunan dan 8 (delapan) arah kebijakan yang akan di wujudkan dalam rangka mendukung agenda pembangunan: "penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, menuju Indonesia Emas 2045." Sasaran pembangunan Kementerian Investasi dalam RPJMN 2025-2029 adalah mendukung pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan melalui peningkatan realisasi investasi berkualitas, peningkatan daya saing, transformasi ekonomi, serta percepatan hilirisasi industri, yang diukur dengan indikator seperti peningkatan realisasi penanaman modal (PMA/PMDN), percepatan hilirisasi, dan kontribusi investasi terhadap PDB."

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM ditetapkan melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2025 - 2029.

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025 - 2029 merupakan perencanaan jangka menengah Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Sejalan dengan arahan kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Berdasarkan visi dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM 2025 -2029 yaitu terwujudnya penanaman modal yang tinggi dan berkualitas untuk menuju Indonesia Emas 2045, maka dalam rangka mewujudkan visi yang ditetapkan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM mendukung misi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 sesuai dengan RPJMN 2025-2029. Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM pada tahun 2025-2029 utamanya berperan dalam mendukung pencapaian misi (Prioritas Nasional) ke-5 yaitu “Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri”

Dengan memperhatikan hal tersebut, arah kebijakan dan strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi / BKPM terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu (i) Arah kebijakan dan strategi nasional; dan (ii) Arah kebijakan dan strategi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. Arah kebijakan dan strategi nasional akan menjadi acuan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan kontribusinya pada pencapaian sasaran pembangunan RPJMN sesuai dengan kewenangannya.

Strategi Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terkait dengan arah kebijakan pertama adalah dengan meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan fasilitasi pemanfaatan fasilitas penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal

Salah satu aspek dari Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 - 2029 yang menjadi tugas dan fungsi Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk arah kebijakan pertama adalah Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal untuk meningkatkan realisasi penanaman modal.

Adapun target realisasi penanaman modal yang ditetapkan untuk Tahun 2025 sesuai Renstra 2025 - 2029 sebesar Rp 1.905,6 Triliun.

3. Perjanjian Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai ukuran keberhasilan dari sasaran yang hendak dicapai dalam program tersebut, dinilai dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal melalui Perjanjian Kinerja

Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	1	Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90
		2	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko (%)	90
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya (%)	90
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4	Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)	3,4
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat/nilai)	80
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	79
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	86
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5

Adapun pagu anggaran APBN Tahun 2025 untuk melaksanakan seluruh kegiatan dalam program Penanaman Modal dan Hilirisasi yang dialokasikan Tahun 2025 sebesar Rp. 22.236.383.000.

III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan dengan membandingkan antara target capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perkin dengan realisasinya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, dilakukan pengkategorian capaian kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja selama tahun 2025. Adapun pengkategorian capaian kinerja untuk Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Kategori Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2024

No.	Kategori	Rentang Nilai	Kode
1.	Sangat Baik	> 100	Biru
2.	Baik	80 – 100	Hijau
3.	Cukup	50 – 79	Kuning
4.	Kurang	< 49	Merah

Capaian kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan Indikator Kinerja Utama selama tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	KODE
1.	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	1.	Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90	100,18	
		2.	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko (%)	90	100	
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya (%)	90	105,4	
SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI	KODE

2.	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4.	Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)	3,4	3,46	
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat/nilai)	80	66,60	
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	79	85,14	
		7.	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	86	86,29	
		8.	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5	0 (tidak ada temuan)	

*) Target mengacu kepada Renstra

Berdasarkan data diatas, diperoleh Nilai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 88,52 dengan Kategori “Baik”.

Sesuai dengan RKP 2025 target realisasi investasi adalah sebesar Rp 1.905,6 Triliun, dengan capaian Rp 1.931,2 Triliun atau sebesar 101,3% dari target yang ditetapkan. Secara total, nilai realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp 780,9 Triliun (40,4% dari realisasi investasi periode Januari - Desember 2025). Jika dirinci kepada PMA/PMDN, nilai realisasi investasi PMA untuk sektor sekunder (manufaktur) sebesar Rp 541,2 Triliun (60,1% dari realisasi investasi PMA). Sedangkan untuk realisasi investasi sektor sekunder (manufaktur) pada PMDN tercatat sebesar Rp 239,7 Triliun (23,3% dari realisasi investasi PMDN).

Pada Grafik 1 dibawah ini dapat dilihat bahwa 5 besar realisasi investasi PMA & PMDN berdasarkan subsektor Tahun 2021 - 2025 didominasi oleh subsektor Industri Pengolahan (*Manufacturing*), dilanjutkan subsektor Infrastruktur dan Jasa.

Grafik 1. Tren Realisasi Investasi Berdasarkan Subsektor Tahun 2021-2025

2021	2022	2023	2024	2025
Infrastruktur dan Jasa Rp 442,4 T (49,1%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 497,7 T (41,2%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 596,3 T (42,0%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 721,2 T (42,1%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 860,9 T (44,6%)
Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 325,4 T (36,1%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 496,9 T (41,2%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 567,1 T (40,0%)	Infrastruktur dan Jasa Rp 695,6 T (40,6%)	Industri Pengolahan (Manufacturing) Rp 780,9 T (40,4%)
Pertambangan Rp 81,2 T (9,0%)	Pertambangan Rp 136,4 T (11,3%)	Pertambangan Rp 156,5 T (11,0%)	Pertambangan Rp 184,7 T (10,7%)	Pertambangan Rp 199,6 T (10,3%)
Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 43,6 T (4,8%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 64,6 T (5,3%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 71,7 T (5,1%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 72,9 T (4,3%)	Tanaman Pangan, Perkebunan dan Peternakan Rp 67,2 T (3,5%)
Kehutanan Rp 7,5 T (0,8%)	Kehutanan Rp 10,0 T (0,8%)	Kehutanan Rp 24,5 T (1,7%)	Kehutanan Rp 34,7 T (2,0 %)	Kehutanan Rp 19,5 T (1,0 %)
Perikanan Rp 1,3 T (0,1%)	Perikanan Rp 1,7 T (0,1%)	Perikanan Rp 2,5 T (0,2%)	Perikanan Rp 5,1 T (0,3%)	Perikanan Rp 3,1 T (0,2%)

Tabel 4 .Capaian Kinerja Direktorat Wilayah I Tahun 2025 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT WILAYAH I
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah I	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah I berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90,00	93,28
		2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah I (%)	90,00	100
		3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah I (%)	90,00	112,5
		4. Persentase fasilitasi badan usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	80,00	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	5. Indeks kepuasan stakeholders atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (indeks)	3,40	3,4

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah I	6 Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80,00	81
		7 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah I (nilai)	75,00	80,71
		8 Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah I (%)	98,00	98,63
		9 Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah I TA 2024 (%)	5,00	0

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 : Direktorat Wilayah I

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	Rp 3.106.549.000	Rp 3.063.942.251
	Total	Rp 3.106.549.000	Rp 3.063.942.251

Tabel 5. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah II Tahun 2025 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT WILAYAH II

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90	100
		2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal	90	100

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET	REALISASI
			berusaha berbasis risiko di Wilayah II (%)		
		3	Persentase fasilitasi Perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah II (%)	90	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	4.	Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (indeks)	3,4	3,4
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah II	5.	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80	81
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah II (nilai)	75	82,50
		7.	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah II (%)	98	99,31
		8.	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah II TA 2024 (%)	5	0 (tidak ada temuan)

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 : Direktorat Wilayah II

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	Rp. 6.350.664.000	Rp. 6.306.901.156
	Total	Rp. 6.350.664.000	Rp 6.306.901.156

Tabel 6. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah III Tahun 2025

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT WILAYAH III
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di wilayah III.	1. Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi di wilayah III (%).	90,00	104,6%
		2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berbasis risiko di wilayah III (%).	90,00	100%
		3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di wilayah III (%).	90,00	100%
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III	4. Indeks kepuasan <i>stakeholders</i> atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (indeks).	3,40 dari skala 4,0	3,46
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah III	5. Persentase rekomendasi evaluasi AKIP yang ditindaklanjuti (%)	80,00	81
SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI

		6.	NKPA Direktorat Wilayah III (nilai).	75,00	81
		7.	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah III (%).	98,00	99,6%
		8.	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan Anggaran Direktorat Wilayah III TA 2025 (%).	5,00	0%

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 : Direktorat Wilayah III

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	Rp 6.103.465.000,00	Rp 6.078.959.485,00
	Total	Rp 6.103.465.000,00	Rp 6.078.959.485,00

Tabel 7. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah IV Tahun 2025

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT WILAYAH IV
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal melalui pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Presentase capaian realisasi investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90	99,19
		2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah IV (%)	90	100

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
------------------	-------------------	--------	-----------

		3.	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah IV (%)	90	100
2.	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	4.	Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV (indeks)	3,4	3,1
3.	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah IV	5.	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80	81
		6.	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah IV (nilai)	75	85%
		7.	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah IV (%)	98	99,82%
		8.	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah IV TA 2024 (%)	5	0 (tidak ada temuan)

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 : Direktorat Wilayah IV

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	1.708.448.000	1.705.391.372
	Total	1.708.448.000	1.705.391.372

Tabel 8. Capaian Kinerja Direktorat Wilayah V Tahun 2025

**CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT WILAYAH V
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1. Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah V	1. Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90,00	64
	2. Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah V (%)	90,00	90,00
	3. Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah V (%)	90,00	90,00
2. Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	4. Indeks kepuasan stakeholders atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (indeks)	3,70	3,76
3. Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah V	5. Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80,00	81
	6. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah V (nilai)	75,00	83,48
	7. Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah V (%)	98,00	99,83
	8. Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat	5,00	0.00

		Wilayah V TA 2025 (%)		
--	--	-----------------------	--	--

Pagu Anggaran dan Realisasi Tahun 2025 : Direktorat Wilayah V

No	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI
1.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	Rp4.967.257.000,00	Rp4.959.011.214,00
Total Anggaran Tahun 2025		Rp4.967.257.000,00	Rp4.959.011.214,00

2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 - 2029 telah dijadikan panduan dalam penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja tahunan Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Penjelasan capaian prestasi kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sepanjang Tahun 2025 sebagaimana pada uraian berikut :

a. Nilai Realisasi Penanaman Modal

Definisi realisasi penanaman modal adalah akumulasi nilai seluruh kegiatan investasi yang dilakukan oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Cakupan nilai ini mencakup berbagai bentuk investasi, namun tidak termasuk sektor minyak dan gas (migas), perbankan, lembaga keuangan non-perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/ BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (online single submission) bahwa kegiatan pemantauan perkembangan kegiatan usaha dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang tercantum dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang disampaikan oleh perusahaan kepada Kementerian Investasi/BKPM melalui oss.go.id. Pelaporan LKPM wajib disampaikan oleh seluruh pelaku usaha Non UMK (Triwulanan) maupun UMK (Semester) yang menghimpun data pemantauan proyek kegiatan usaha sesuai periode pelaporan.

Target nilai realisasi investasi Tahun 2025 yang ditetapkan di dalam Renstra BKPM 2025 – 2029 adalah sebesar 1905,6 T, dimana target tersebut merupakan target bersama yang harus dicapai oleh seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui koordinasi yang baik dan sinergis antara pusat dan daerah. Dari potensi minat/komitmen investasi masing-masing daerah maka ditetapkan target nilai realisasi investasi untuk Tahun 2025 pada setiap provinsi. Adapun target realisasi investasi per provinsi tersebut dapat dilihat pada Tabel 8 berikut:

Tabel 9. Target dan Realisasi PMA dan PMDN Investasi Per-Provinsi Tahun 2025

- i. Wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, dan Lampung.

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Sumatera Utara	10,53	9,00	85,51
2	Aceh	53,66	58,53	109,08
3	Sumatera Barat	10,77	16,81	156,14
4	Kepulauan Riau	95,28	69,47	72,91
5	Riau	57,88	64,68	111,74
6	Sumatera Selatan	78,84	62,67	79,49
7	Lampung	10,76	15,20	141,24
Total		297,00	317,72	93,28

- ii. Wilayah Jambi, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah.

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	254,97	270,93	106,26
2	Kalimantan Selatan	30,62	32,86	107,33
3	Kalimantan Barat	30,39	51,04	167,99
4	Daerah Istimewa Yogyakarta	4,64	8,44	181,87
5	Kalimantan Timur	79,85	87,79	109,94
6	Kalimantan Tengah	25,93	23,97	92,45
7	Jambi	13,38	17,27	129,07
Total		439,76	492,29	111,95

- iii. Wilayah Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara.

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Jawa Barat	270,89	296,83	109,57
2	Banten	119,53	130,16	108,89
3	Jawa Tengah	78,32	88,50	113,00
4	Sulawesi Utara	9,31	10,13	108,79
5	Sulawesi Tengah	162,55	127,18	78,24
6	Sulawesi Selatan	16,61	19,54	117,69
7	Sulawesi Tenggara	13,28	28,97	218,21
Total		670,49	701,31	122,05

- iv. Wilayah Jawa Timur, Bali, NTT, NTB, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Selatan

No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Jawa Timur	155,59	145,11	93,27
2	Nusa Tenggara Barat	61,08	59,19	96,90
3	Bali	45,61	42,8	93,87
4	Nusa Tenggara Timur	4,69	4,86	103,66
5	Papua	1,23	1,26	102,07
6	Papua Pegunungan	0,09	0,01	15,23
7	Papua Tengah	25,35	28,46	112,28
8	Papua Selatan	5,28	9,38	177,63
9	Maluku	3,76	1,13	29,93
10	Maluku Utara	83,35	90,70	108,82
Total		386,03	382,91	99,19

- v. Wilayah Provinsi Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Papua Barat dan Papua Barat Daya

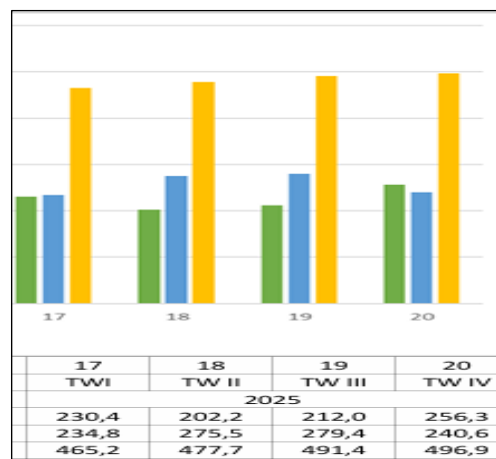
No	Provinsi	Target	Realisasi	%
1	Kepulauan Bangka Belitung	17,20	10,33	60%
2	Bengkulu	10,31	3,03	29%
3	Kalimantan Utara	37,73	27,43	73%
4	Gorontalo	5,03	5,21	104%
5	Sulawesi Barat	3,34	1,67	50%
6	Papua Barat	14,52	7,08	49%
7	Papua Barat Daya	3,49	3,54	102%
Total		91,62	58,29	64%

Pencapaian prestasi kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada periode Januari - Desember Tahun 2025 dapat dilihat pada capaian nilai realisasi penanaman modal Tahun 2025 yaitu sebesar Rp 1.931,2 Triliun atau sekitar 101,3% dari target yang ditetapkan (Rp 1.905,6 Triliun) yang terdiri dari realisasi investasi PMDN sebesar Rp 1.030,3 Triliun dan realisasi PMA sebesar Rp 900,9 Triliun. Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada Tahun 2024 maka terjadi peningkatan yang signifikan yaitu sebesar 12,7% di mana capaian realisasi penanaman modal pada Januari - Desember 2024 adalah sebesar Rp 1.714,2 Triliun. Capaian tersebut merupakan prestasi kinerja terhadap indikator kinerja jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau pada Tahun 2025.

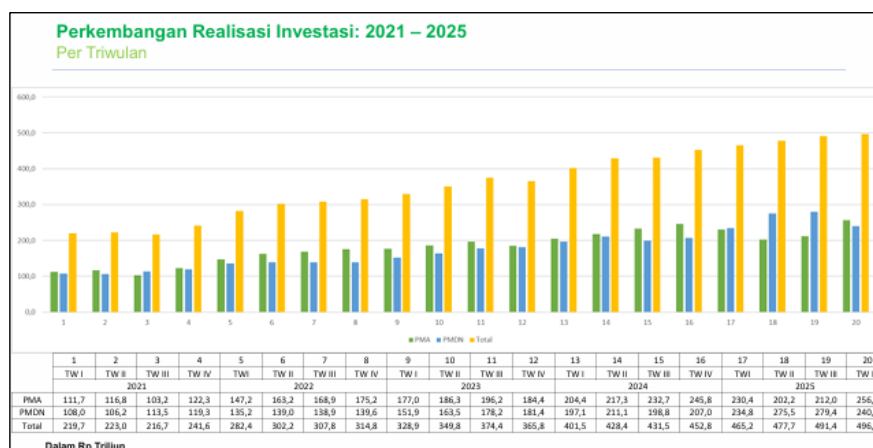
Capaian nilai realisasi penanaman modal Tahun 2025 diperoleh berdasarkan penghimpunan LKPM sebanyak 880.017 proyek yang terdiri dari 722.354 proyek PMDN dan 157.663 proyek PMA. Seiring dengan peningkatan capaian realisasi investasi yang signifikan, jumlah LKPM Online yang berhasil dihimpun Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 181,54% dari Tahun 2024 sebanyak 312.573 proyek.

Capaian nilai realisasi investasi pada Tahun 2025 merupakan akumulasi nilai realisasi investasi dari setiap periode pelaporan (triwulan), dimana pada Triwulan I (Januari - Maret) Tahun 2025 nilai realisasi investasi mencapai Rp 465,2 Triliun, Triwulan II (April - Juni) sebesar Rp 477,7 Triliun, Triwulan III (Juli - September) mencapai sebesar Rp 491,4 Triliun, dan hingga pada Triwulan IV (Oktober - Desember) sebesar Rp. 496,9 Triliun. Perkembangan realisasi investasi pada setiap periode pelaporan dapat dilihat pada Grafik 2 berikut:

Grafik 2. Capaian Realisasi Investasi PMA dan PMDN Tahun 2025



Grafik 3. Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2021 - 2025



Pencapaian kinerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025 terhadap indikator kinerja jumlah nilai realisasi penanaman modal yang terpantau merupakan hasil keberhasilan bersama antara pusat dan daerah dalam menghimpun LKPM. Hal

tersebut tidak terlepas dari kerjasama dan koordinasi yang baik antara unit Direktorat Wilayah sebagai unit kerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan setiap daerah yang berada dibawah wilayah pemantauannya.

Dari capaian realisasi investasi Tahun 2025 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

i. Realisasi Investasi PMDN

Lima besar realisasi berdasarkan sektor usaha adalah: transportasi, gudang dan telekomunikasi (Rp. 34,6 triliun), perumahan, kawasan industri dan perkantoran (Rp 23,5 triliun), jasa lainnya (Rp. 22,6 triliun), pertambangan (Rp. 22,3 triliun), konstruksi (Rp. 22,1 triliun). Sementara berdasarkan lokasi proyek adalah: DKI Jakarta (Rp. 44,1 triliun), Jawa Barat (Rp. 30,6 triliun), Jawa Timur (Rp. 29,2 triliun), Banten (Rp. 19,3 triliun), dan Kalimantan Timur (Rp. 15 triliun).

ii. Realisasi Investasi PMA

Lima besar sektor usaha adalah: Industri logam dasar, barang logam, bukan mesin dan peralatannya (USD 3,9 miliar), listrik, gas dan air (USD 1,4 miliar), industri kertas dan percetakan (USD 1,3 miliar), industri kimia dan farmasi (USD 1,2 miliar) dan pertambangan (USD 1,2 miliar).

Lima besar lokasi proyek adalah: Jawa Barat (USD 3 miliar), Sulawesi Tengah (USD 1,7 miliar) Maluku Utara (USD 1,7 miliar), DKI Jakarta (USD 1,4 miliar), dan Banten (USD 1,2 miliar).

Lima besar negara asal investor adalah: Singapura (USD 4,8 miliar), Hongkong (USD 3,4 miliar), R.R. Tiongkok (USD 2,1 miliar), Malaysia (USD 1,7 miliar), dan Jepang (USD 0,8 miliar).

iii. Sebaran Lokasi Proyek

Realisasi investasi di Jawa sebesar Rp. 247,5 triliun (49,8%) dan realisasi di Luar Jawa sebesar Rp. 249,4 triliun (50,2%).

iv. Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia

Realisasi penyerapan tenaga kerja Indonesia mencapai 754.186 orang yang terdiri dari proyek PMDN sebanyak 483.974 orang (64,2%) dan proyek PMA sebanyak 270.212 orang (35,8%).

b. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko

Sebagai salah satu upaya untuk menjaga tertib administrasi bagi penanam modal serta mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka salah satu tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah melaksanakan kegiatan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko.

Pengawasan berusaha berbasis risiko dimaksud dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan melibatkan berbagai stakeholder terkait antara lain Kementerian/Lembaga sesuai sektor, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Administrator KEK dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB melalui Subsistem Pengawasan pada Sistem OSS. Kegiatan pengawasan perlu dilakukan sebagai tindak lanjut dari:

- 1) Evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan persyaratan dasar dan perizinan berusaha berbasis risiko yang dimiliki.
- 2) Adanya indikasi penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan usaha.
- 3) Pemantauan pemberian fasilitas penanaman modal.

Kegiatan pengawasan berusaha berbasis risiko yang dilakukan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2025 melalui unit kerja Direktorat Wilayah I, II, III, IV, dan V dapat dilihat pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko

Tahun	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	80	106,29	132,86	Sangat Baik
2025	90	100	111,11	Sangat Baik

Berdasarkan Tabel 10 di atas, pada tahun 2024, Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko ditetapkan dengan target sebesar 80 persen. Realisasi kinerja yang dicapai mencapai 106,29 persen, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 132,86 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan telah melampaui target yang ditetapkan dan masuk dalam kategori Sangat Baik.

Selanjutnya, pada tahun 2025 target indikator kinerja ini meningkat menjadi 90 persen. dengan realisasi kinerja mencapai 100 persen, dengan tingkat capaian sebesar 111,11 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa meskipun target mengalami peningkatan, pelaksanaan pengawasan tetap berjalan optimal dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Kinerja pada tahun 2025 juga berada dalam kategori Sangat Baik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan konsistensi pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko yang efektif. Hal ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam menjaga

kualitas pengawasan serta mendukung peningkatan kepatuhan dan kinerja pelaku usaha.

Capaian kinerja pada indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Berusaha Berbasis Risiko selama tahun 2024–2025 menunjukkan tren yang positif dan stabil. Pada tahun 2024, capaian kinerja sangat tinggi dengan persentase capaian 132,86 persen. Pada tahun 2025, meskipun persentase capaian menurun menjadi 111,11 persen, hal tersebut disebabkan oleh peningkatan target kinerja, bukan penurunan kualitas pelaksanaan. Realisasi kinerja tetap mampu melampaui target yang ditetapkan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem pengawasan yang diterapkan telah berjalan efektif dan adaptif terhadap peningkatan standar kinerja, serta menunjukkan konsistensi kinerja perangkat daerah dalam melaksanakan fungsi pengawasan penanaman modal berbasis risiko.

Pencapaian yang melampaui target juga mengindikasikan adanya dukungan sistem pengawasan yang memadai, koordinasi yang baik antarunit terkait, serta pemanfaatan data dan informasi secara optimal dalam memantau perkembangan realisasi penanaman modal. Selain itu, pendekatan berbasis risiko dinilai mampu meningkatkan fokus pengawasan pada sektor atau pelaku usaha yang memiliki tingkat risiko lebih tinggi.

Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dengan tetap menjaga kualitas pelaksanaan pengawasan, meningkatkan akurasi pemetaan risiko, serta memastikan bahwa hasil pengawasan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan perbaikan layanan penanaman modal secara berkelanjutan.

c. Persentase Fasilitasi Perusahaan yang Dapat terselesaikan Permasalahannya

Kegiatan fasilitasi permasalahan perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya oleh Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal pada Tahun 2025 dilaksanakan meliputi kendala perizinan, persoalan lingkungan, resistensi dari masyarakat sekitar.

Tabel 11. Fasilitasi Perusahaan yang dapat terselesaikan Permasalahannya

Tahun	Kegiatan Fasilitasi Perusahaan Yang Dapat Terselesaikan Permasalahannya			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	79	106,15	134,36	Sangat Baik
2025	90	105,4	117,11	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Kegiatan Fasilitasi Perusahaan yang Dapat Terselesaikan Permasalahannya ditetapkan dengan target sebesar 79 persen. Realisasi kinerja yang dicapai mencapai 106,15 persen, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 134,36 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan fasilitasi perusahaan berjalan sangat efektif dan mampu melampaui target yang ditetapkan, dengan kategori kinerja Sangat Baik.

Pada tahun 2025, target kinerja meningkat menjadi 90 persen. Realisasi kinerja

tercatat sebesar 105,4 persen dengan tingkat capaian kinerja sebesar 117,11 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun target mengalami peningkatan, kegiatan fasilitasi perusahaan tetap dilaksanakan secara optimal dan berhasil melampaui target yang telah ditetapkan. Capaian kinerja tahun 2025 juga berada dalam kategori Sangat Baik.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 menunjukkan konsistensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan fasilitasi perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha. Hal ini mencerminkan peran aktif perangkat daerah dalam mendukung iklim investasi yang kondusif melalui penyelesaian permasalahan perusahaan secara tepat dan berkelanjutan.

Capaian Kegiatan Fasilitasi Perusahaan yang Dapat terselesaikan Permasalahannya pada tahun 2024–2025 menunjukkan tren kinerja yang positif dan konsisten. Pada tahun 2024, capaian kinerja mencapai 134,36 persen, mencerminkan tingginya efektivitas pelaksanaan fasilitasi dalam menyelesaikan permasalahan perusahaan. Pada tahun 2025, meskipun tingkat capaian menurun menjadi 117,11 persen, hal tersebut terjadi seiring dengan peningkatan target kinerja. Realisasi tetap mampu melampaui target yang ditetapkan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme fasilitasi perusahaan telah berjalan dengan baik dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha, tepat sasaran, dan berorientasi pada hasil. Kedeputan mampu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi pelaku usaha secara akurat, serta memfasilitasi penyelesaiannya melalui koordinasi yang efektif dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Pendekatan ini berkontribusi signifikan terhadap percepatan realisasi penanaman modal dan peningkatan kepastian berusaha.

Selain itu, capaian yang melampaui target mencerminkan meningkatnya kepercayaan dunia usaha terhadap peran Kedeputan dalam membantu penyelesaian hambatan investasi. Kegiatan fasilitasi tidak hanya berfokus pada penyelesaian administratif, tetapi juga mendorong terciptanya iklim investasi yang kondusif melalui penyelesaian permasalahan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Ke depan, kinerja positif ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan sistem pemantauan tindak lanjut hasil fasilitasi, peningkatan sinergi lintas sektor, serta pemanfaatan data permasalahan sebagai dasar penyusunan kebijakan pengendalian penanaman modal. Dengan demikian, kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan dapat semakin optimal dalam mendukung peningkatan realisasi dan kualitas investasi nasional.

d. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan instrumen evaluasi yang digunakan untuk mengukur secara menyeluruh tingkat kepuasan pengguna terhadap mutu pelayanan publik. Hasil dari survei tersebut kemudian dinyatakan dalam bentuk nilai numerik yang

dikenal sebagai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Survei dilakukan terhadap minimal 100 responden atas kegiatan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal melalui link simantab.bkpm.go.id/survei/Survey_Dalak_2025. Kriteria pengendalian pelaksanaan yang disurvei diukur dengan memberikan 9 pertanyaan untuk 9 ruang lingkup unsur layanan Unit Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Untuk Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2025 ini diperoleh nilai sebesar 3,5 dari target 3,4 (skala 4) dari 619 responden sebagaimana Tabel 12.

Tabel 12. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

No.	Ruang Lingkup (Unsur) Pelayanan	Indeks (Skala 4)
1.	Persyaratan Pelayanan	3,4
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan	3,4
3.	Waktu Pelayanan/Penyelesaian	3,4
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3,7
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,4
6.	Kompetensi Pelaksana	3,5
7.	Perilaku Pelaksana	3,5
8.	Sarana dan Prasarana	3,4
9.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,4
Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang		3,46

Berdasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap unsur pelayanan, diperoleh Nilai Rata-rata (NRR) IKM Tertimbang sebesar 3,46 pada skala 4. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan berada pada kategori baik, serta mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat yang relatif tinggi terhadap layanan yang diberikan.

Hasil penilaian pada masing-masing unsur pelayanan menunjukkan bahwa hampir seluruh aspek memperoleh nilai yang konsisten pada kisaran 3,4 hingga 3,7. Unsur Biaya/Tarif Pelayanan memperoleh nilai tertinggi sebesar 3,7, yang mengindikasikan bahwa masyarakat menilai aspek pembiayaan layanan telah transparan, jelas, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, unsur Kompetensi Pelaksana dan Perilaku Pelaksana masing-masing memperoleh nilai 3,5, yang mencerminkan bahwa petugas pelayanan dinilai memiliki

kemampuan yang memadai serta sikap dan perilaku yang profesional dalam memberikan pelayanan.

Sementara itu, unsur Persyaratan Pelayanan, Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan, Waktu Pelayanan/Penyelesaian, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Sarana dan Prasarana, serta Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan masing-masing memperoleh nilai 3,4. Nilai tersebut menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut telah berjalan dengan baik, namun masih memiliki ruang untuk ditingkatkan, khususnya dalam hal penyederhanaan prosedur, percepatan waktu pelayanan, serta optimalisasi sarana pendukung dan mekanisme pengelolaan pengaduan.

Perbandingan capaian indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tahun	Indeks Kepuasan Pelaku Usaha / Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	3,4	3,5	102,94	Sangat Baik
2025	3,4	3,46	101,76	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal atas Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal ditetapkan dengan target sebesar 3,4. Realisasi indeks kepuasan yang dicapai sebesar 3,5, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 102,94 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pengendalian pelaksanaan penanaman modal berada di atas target yang ditetapkan dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2025, target indikator kinerja tetap ditetapkan sebesar 3,4. Realisasi indeks kepuasan kembali mencapai 3,46 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101,76 persen. Hasil ini menunjukkan konsistensi kinerja perangkat daerah dalam menjaga kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta mempertahankan tingkat kepuasan pelaku usaha pada kategori Sangat Baik.

Capaian Indeks Kepuasan Pelaku Usaha/Penanam Modal selama tahun 2024–2025 menunjukkan tren yang stabil dan positif. Realisasi indeks kepuasan pada kedua tahun tersebut secara konsisten berada di atas target yang ditetapkan, dengan tingkat capaian kinerja yang sama. Hal ini mencerminkan keberlanjutan kualitas layanan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dirasakan langsung oleh pelaku usaha.

Stabilitas capaian ini mengindikasikan bahwa kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengendalian penanaman modal telah berjalan efektif serta mampu memenuhi ekspektasi pelaku usaha secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, capaian NRR IKM mencerminkan komitmen unit pelayanan dalam memberikan layanan yang berkualitas. Ke depan, peningkatan kualitas pelayanan dapat difokuskan pada unsur-unsur dengan nilai relatif lebih rendah melalui perbaikan berkelanjutan, inovasi layanan, serta penguatan orientasi pelayanan kepada masyarakat, sehingga tingkat kepuasan masyarakat dapat terus ditingkatkan secara berkesinambungan.

e. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Capaian Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal atas rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Tahun 2025 mendapatkan capaian sementara atas Nilai Akuntabilitas Kinerja 66,6 dari target 80, atau memperoleh predikat B. Capaian tersebut tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 14. Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tahun	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	80	71,10	88,87	Sangat Baik (BB)
2025	80	66,6	83,25	Baik (B)

Pada tahun 2024, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ditetapkan dengan target sebesar 80. Realisasi nilai AKIP yang dicapai sebesar 71,10, sehingga tingkat capaian kinerja berada pada angka 88,87 persen. Berdasarkan hasil tersebut, capaian kinerja AKIP tahun 2024 berada dalam kategori Memuaskan.

Pada tahun 2025, target nilai AKIP tetap ditetapkan sebesar 80. Realisasi nilai AKIP tercatat sebesar 66,6 dengan tingkat capaian kinerja sebesar 80 persen. Berdasarkan hasil evaluasi, capaian kinerja AKIP tahun 2025 berada dalam kategori Baik (B).

Capaian Nilai Evaluasi AKIP pada tahun 2024–2025 menunjukkan dinamika kinerja yang perlu mendapat perhatian. Secara persentase, tingkat capaian kinerja mengalami penurunan dari 88,87 persen pada tahun 2024 menjadi 80 persen pada tahun 2025. Namun demikian, hasil evaluasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan kualitas kategori penilaian menjadi Baik (B), yang mencerminkan adanya perbaikan pada aspek tata kelola dan akuntabilitas kinerja meskipun nilai realisasi numerik menurun.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya perbaikan sistem akuntabilitas kinerja telah memberikan dampak positif terhadap hasil penilaian kualitatif, meskipun masih

diperlukan penguatan lebih lanjut untuk mencapai target nilai yang ditetapkan.

Meskipun belum mencapai target, capaian sementara ini memberikan gambaran bahwa upaya perbaikan telah berjalan, namun belum optimal dan masih membutuhkan konsistensi serta komitmen yang lebih kuat di seluruh unit kerja. Hal ini menjadi dasar penting bagi Kedeputan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk melakukan langkah-langkah perbaikan secara terarah.

Beberapa hal yang menyebabkan belum optimalnya nilai capaian AKIP Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah :

1. Perencanaan Kinerja Belum Sepenuhnya Berbasis Outcome
2. Indikator Kinerja Belum Mencerminkan Kinerja Substantif
3. Pengukuran Kinerja Belum Didukung Data yang Andal
4. Pemanfaatan Hasil Kinerja Belum Optimal dalam Manajemen
5. Kualitas Pelaporan Kinerja Masih Perlu Ditingkatkan
6. Evaluasi Internal dan Tindak Lanjut Belum Berkelanjutan
7. Pengaruh Faktor Eksternal terhadap Capaian Kinerja

Capaian AKIP belum optimal karena perencanaan kinerja masih cenderung berorientasi pada output kegiatan, bukan pada outcome atau dampak strategis pengendalian penanaman modal. Selain itu, keterkaitan (cascading) antara sasaran Deputi, unit kerja, dan individu belum sepenuhnya kuat sehingga berdampak pada lemahnya konsistensi pencapaian kinerja. Salah satu contohnya disebabkan oleh belum disusunnya Rencana Strategis Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2020-2024 yang merinci aspek perencanaan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi internal dan capaian kinerja.

Ke depan, peningkatan capaian nilai Akuntabilitas Kinerja dapat dilakukan melalui penguatan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi hasil, penyempurnaan indikator kinerja yang terukur dan relevan, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta optimalisasi tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi AKIP. Dengan upaya tersebut, diharapkan capaian nilai AKIP pada periode berikutnya dapat meningkat dan mendekati, bahkan melampaui, target yang telah ditetapkan.

f. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya di Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pada Tahun 2025 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Capaian kinerja perencanaan anggaran dijelaskan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 15. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tahun	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	N	N	N	-
2025	79	85,14	107,77%	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) belum ditetapkan dan belum dilakukan penilaian, sehingga target, realisasi, dan capaian kinerja tercatat N/N. Oleh karena itu, pada tahun tersebut belum dapat dilakukan pengukuran dan evaluasi terhadap capaian indikator NKPA.

Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) ditetapkan dengan target sebesar 79. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 85,14, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 107,77 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kinerja perencanaan anggaran telah melampaui target yang ditetapkan dan berada dalam kategori Sangat Baik.

Capaian NKPA menunjukkan perkembangan kinerja yang positif. Tahun 2024 belum dapat dijadikan dasar evaluasi karena indikator belum dinilai. Namun, pada tahun 2025, pelaksanaan perencanaan anggaran telah menunjukkan hasil yang sangat baik dengan capaian kinerja di atas target.

Hasil ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan anggaran telah berjalan secara efektif dan selaras dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja, serta mencerminkan peningkatan kualitas perencanaan program dan kegiatan.

Nilai NKPA yang melebihi target mencerminkan kualitas perencanaan anggaran yang semakin matang, antara lain melalui kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran, ketepatan penetapan kegiatan dan output, serta konsistensi dalam penyusunan dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini juga mengindikasikan bahwa proses penganggaran telah mampu mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan secara optimal.

Pencapaian tersebut menjadi bukti adanya peningkatan kapasitas pengelolaan anggaran di lingkungan Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Ke depan, kinerja ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan koordinasi perencanaan, peningkatan kualitas data pendukung, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan perencanaan anggaran pada periode berikutnya.

g. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal adalah proses penilaian terhadap kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran, dimana untuk Satuan Kerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dan pada Tahun 2025 ini mendapat nilai sebesar 86,29 dari target sebesar 86. Capaian tersebut tergambar dalam grafik tersebut dibawah ini :

Tabel 16. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tahun	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	86	83,75	97,38	Sangat Baik
2025	86	86,29	100,33	Sangat Baik

Pada tahun 2024, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ditetapkan dengan target sebesar 86. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 83,75, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 97,38 persen. Berdasarkan hasil tersebut, kinerja pelaksanaan anggaran pada tahun 2024 berada dalam kategori Sangat Baik.

Pada tahun 2025, target Nilai IKPA tetap ditetapkan sebesar 86. Realisasi kinerja tercatat sebesar 86,29, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100,33 persen. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya dan berada dalam kategori Sangat Baik.

Capaian Nilai IKPA pada tahun 2024–2025 menunjukkan tren kinerja yang meningkat dan stabil. Pada tahun 2024, realisasi kinerja telah mendekati target yang ditetapkan, dan pada tahun 2025 kinerja berhasil melampaui target. Hal ini mencerminkan pengelolaan dan pelaksanaan anggaran yang semakin efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peningkatan capaian ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian anggaran yang berdampak positif terhadap kualitas pelaksanaan program dan kegiatan.

Secara keseluruhan, nilai IKPA Kantor Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal menunjukkan bahwa hasil pelaksanaan anggaran telah mendukung

pencapaian output, namun masih diperlukan peningkatan pada aspek ketepatan perencanaan penarikan dana, pengelolaan belanja kontraktual, dan percepatan penyelesaian tagihan agar kinerja pelaksanaan anggaran ke depan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

h. Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada Tahun 2025, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan (LK) Tahun 2024, Satuan Kerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mencatatkan hasil 0% nilai temuan, atau tidak terdapat temuan pemeriksaan. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target yang telah ditetapkan, yaitu maksimal 5% temuan. Capaian tersebut tergambar sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 17. Persentase Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Tahun	Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK			
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
2024	5	0	100	Terbaik
2025	5	0	100	Terbaik

Pada tahun 2024, Persentase Batas Tertinggi Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan ditetapkan sebesar 5 persen. Realisasi capaian temuan tercatat 0 persen, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100 persen. Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sangat baik, tanpa terdapat temuan signifikan dari BPK, sehingga kategori kinerja berada pada level Terbaik.

Pada tahun 2025, target indikator tetap ditetapkan sebesar 5 persen. Realisasi capaian temuan kembali 0 persen, dengan tingkat capaian kinerja 100 persen. Hasil ini menunjukkan konsistensi pengelolaan keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga kategori kinerja tetap Terbaik.

Tidak adanya temuan mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan pada satuan kerja tersebut telah dilaksanakan secara akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, hal ini mencerminkan efektivitas sistem pengendalian intern, kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang konsisten.

Capaian 0% temuan juga menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan dibandingkan dengan target yang ditetapkan, sekaligus memperkuat

kepercayaan pemangku kepentingan terhadap kinerja pengelolaan keuangan di lingkungan Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Ke depan, capaian ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan pengendalian intern, konsistensi kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan keuangan, sehingga kualitas laporan keuangan tetap terjaga dan berkelanjutan.

3. Akuntabilitas Keuangan

Pagu anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berdasarkan revisi terakhir adalah sebesar Rp 22.236.383.000. Sedangkan hingga 31 Desember 2025 realisasi anggaran Satuan Kerja Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sebesar Rp 22.121.347.477 atau mencapai 99,48% (realisasi netto).

4. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kedeputan Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi Kementerian/Lembaga dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan alokasi anggaran. Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi :

- a) Data capaian Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)
- b) Data pagu anggaran
- c) Data realisasi anggaran

Efisiensi anggaran terjadi jika sumber daya dikeluarkan melebihi capaian kinerja keluaran tertentu, maka efisiensi rendah. Sebaliknya jika sumber daya yang dikeluarkan lebih rendah dari capaian kinerja tertentu, maka efisiensi anggarannya semakin tinggi. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran seharusnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan.

Tabel 18. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA PENGENDALIAN TAHUN 2025							
No	Sasaran	Indikator Kinerja	Anggaran		Capaian (%)	Capaian IK (%)	Efisiensi (%)
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	1 Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	8.772.119.000	8.720.429.033	99,41	110,00	10,59
		2 Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko (%)	1.190.574.000	1.185.504.768	99,57	110,00	10,43
		3 Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya (%)	12.248.690.000	12.190.613.676	99,53	110,00	10,47
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4 Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)	5.000.000	5.000.000	100,00	101,76	1,76
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5 Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)	5.000.000	4.800.000	96,00	83,25	-12,75
		6 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	5.000.000	5.000.000	100,00	107,77	7,77
		7 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	5.000.000	5.000.000	100,00	100,34	0,34
		8 Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas IK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5.000.000	5.000.000	100,00	110,00	10,00
Jumlah			22.236.383.000	22.121.347.477	99,48	104,14	4,66

Berdasarkan tabel diatas dapat dianalisis sebagai berikut :

1. Efisiensi Anggaran Secara Keseluruhan

Total pagu anggaran yang dialokasikan sebesar Rp22.236.383.000 dengan realisasi sebesar Rp22.121.347.477, menghasilkan capaian realisasi anggaran sebesar 99,48%. Ini menunjukkan pengelolaan anggaran yang sangat efektif dengan sisa anggaran yang sangat minim, tepat sasaran untuk mendukung program pengendalian penanaman modal. Tingkat efisiensi keseluruhan mencapai 4,66%, yang artinya terdapat penghematan sumber daya meskipun hampir seluruh anggaran terserap.

2. Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal yang Efektif

Tiga indikator kinerja utama pada sasaran ini menunjukkan capaian realisasi yang sangat tinggi, yaitu antara 99,41% hingga 99,53%, dengan capaian IK yang seragam di angka 110%. Efisiensi anggaran untuk ketiga indikator ini relatif tinggi, yaitu antara 10,43% hingga 10,59%, menandakan penggunaan dana yang efisien dalam mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa pengendalian investasi dan pengawasan penanaman modal berbasis risiko berjalan efektif dengan penggunaan anggaran yang optimal.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian penanaman modal mencapai realisasi 100%, capaian IK 101,76%, dengan efisiensi anggaran hanya sebesar 1,76%. Efisiensi yang lebih rendah di sini mungkin disebabkan oleh kebutuhan biaya yang lebih tinggi dalam menjaga kualitas layanan dan kepuasan stakeholder secara konsisten, meskipun realisasi anggaran tepat sesuai target.

4. Layanan Dukungan Manajemen Lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Pada sasaran ini, terdapat beberapa indikator dengan variasi capaian dan efisiensi:

- o Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) menunjukkan

realisasi anggaran 96%, capaian IK 83,25%, namun mengalami efisiensi negatif - 12,75%, mengindikasikan ada pengeluaran melebihi pagu atau kendala dalam pengelolaan anggaran yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) menunjukkan capaian realisasi dan IK yang sangat baik (100% ke atas), dengan efisiensi positif masing-masing 7,77% dan 0,34%, menandakan pengelolaan anggaran yang cukup efisien dan tepat sasaran dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran.
- Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK menunjukkan realisasi 100%, capaian IK 110%, dan efisiensi anggaran sebesar 10%, yang merupakan capaian sangat baik dalam pengendalian temuan audit dengan penggunaan anggaran yang efisien.

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan dan Saran

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKj)) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal merupakan laporan pertanggungjawaban atas kinerja yang disajikan untuk menunjukkan keberhasilan maupun pencapaian strategis dalam pelaksanaan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2025.

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal, sebagaimana tindak lanjut amanat yang ditentukan dalam Pasal 29, 30 dan

31 Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2024 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal berlandaskan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan, baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 - 2029, Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Kontrak Kerja (Penetapan Kinerja) dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM maupun Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025-2029.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM tentang Rencana Strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM 2025 - 2029 terdapat 2 (dua) sasaran strategis Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yaitu

(1). Terwujudnya Nilai Realisasi Penanaman Modal yang Bernilai Tambah, Inklusif, Berorientasi Ekspor, dan Merata ; (2). Terwujudnya Birokrasi Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM yang Bersih dan Efektif, serta Pelayanan Penanaman Modal yang Prima. Berlandaskan kebijakan tersebut, tugas, fungsi dan tanggung jawab Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal memegang berperan penting dalam menunjang arah kebijakan dan strategi nasional.

Penilaian hasil akhir capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tahun 2029 merupakan rangkaian dari akumulasi penilaian selama Tahun 2029 dengan mangacu pada Renstra Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM Tahun 2025 - 2029 dan Penetapan Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan dengan mengukur, mengevaluasi dan menganalisa data kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal selama Tahun 2029.

Berdasarkan hasil penilaian terhadap IKU Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal untuk mencapai sasaran strategis, didapat kesimpulan bahwa secara umum kinerja Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal sangat baik, karena keempat sasaran strategis sudah terpenuhi dengan capaian rata-rata IKU melebihi target yang telah ditetapkan (di atas 100%) atau mendapatkan kategori “sangat baik” (biru). Prestasi kinerja tersebut diperoleh atas kerjasama dan koordinasi yang baik antara Deputy Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan DPMPSTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam berperan aktif dan berkomitmen untuk menjalankan semua kebijakan penanaman modal yang sudah menjadi kewenangannya.

2. Tindak Lanjut ke Depan

Dalam rangka penyempurnaan pelaksanaan fungsi pengendalian pelaksanaan penanaman modal ke depan, terdapat beberapa hal yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- a. Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi koordinasi dengan berbagai instansi terkait di pusat maupun daerah maka penting dilaksanakannya pertemuan dan koordinasi yang lebih sering, lebih efektif dan intensif dengan instansi teknis terkait lainnya di pusat dan daerah. Hal ini mengingat banyaknya kegiatan yang akan terlaksana optimal dengan melibatkan segenap institusi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat dan dunia usaha;
- b. Untuk mendorong pemantauan terhadap kemajuan perkembangan realisasi proyek penanaman modal dan kegiatan memfasilitasi permasalahan perusahaan, dibutuhkan beberapa perbaikan dan penyempurnaan antara lain meliputi:

- 1) Pemantauan

Melakukan pendekatan secara intensif dengan sosialisasi tentang pemanfaatan sistem Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) atas Kegiatan Berusaha Berbasis Risiko melalui OSS, sehingga LKPM dapat disampaikan tepat waktu dan benar sesuai dengan periode dan tahapan pelaporan. Sanksi perlu dilaksanakan secara tegas terhadap kelalaian penanam modal atas tidak terpenuhinya kewajiban penanam modal.

- 2) Pembinaan

Pelaksanaan pembinaan hendaknya dapat dilaksanakan secara intensif kepada penanam modal dan aparatur daerah untuk memfasilitasi permasalahan-permasalahan penanaman modal maupun indikasi penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fasilitasi terhadap indikasi permasalahan perusahaan dapat diperoleh melalui analisis LKPM, pemantauan langsung maupun informasi atau pengaduan dari investor maupun asosiasi pengusaha. Melalui kegiatan pembinaan ini diharapkan semua permasalahan tersebut dapat difasilitasi dan dikoordinasi sehingga memberikan hasil yang lebih optimal terhadap investasi secara nasional.

- 3) Pengawasan

Kegiatan pengawasan dilaksanakan atas pelaksanaan ketentuan penanaman modal yang dilaksanakan secara koordinatif bersama instansi teknis terkait (instansi Pemerintah dan pemerintah daerah terkait) guna pengambilan kesimpulan dan keputusan atas hasil pengawasan di lapangan yang lebih komprehensif dan efektif termasuk menghasilkan rekomendasi yang tepat guna bagi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Untuk selanjutnya akan dilaksanakan pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko yang terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusaha KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada sistem OSS.

LAMPIRAN

LAMPIRAN I

Pernyataan Penetapan Kinerja Unit Organisasi Eselon I



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Edy Junaedi**
Jabatan : **Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Rosan Perkasa Roeslani**
Jabatan : **Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BKPM

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif	1	Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90
		2	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko (%)	90
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya (%)	90
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	4	Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal (indeks)	3,4
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	5	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (predikat / nilai)	80
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	79
		7	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (nilai)	86
		8	Persentase batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (%)	5

Program : Program Penanaman Modal dan Hilirisasi

Jumlah Anggaran Tahun 2025 : Rp. 48.835.700.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	5.923.285.000
2	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah II	7.326.691.000
3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah III	6.618.042.000
4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	22.413.481.000
5	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	6.554.201.000
Total Anggaran Tahun 2025		48.835.700.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala
BKPM



Rosan Perkasa Roeslani

Pihak Pertama

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

LAMPIRAN II

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Unit Organisasi Eselon II DIREKTORAT WILAYAH I



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT WILAYAH I

(REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Joko Saptono
Jabatan : Direktur Wilayah I

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Edy Junaedi
Jabatan : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama
Direktur Wilayah I



Agus Joko Saptono

PK Revisi 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT WILAYAH I
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
(REVISI 1)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah I	1	Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah I berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90,00
		2	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah I (%)	90,00
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah I (%)	90,00
		4	Persentase fasilitasi badan usaha Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dapat diselesaikan permasalahannya (%)	80,00
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I	5	Indeks kepuasan stakeholders atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah I (indeks)	3,40
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah I	6	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		7	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah I (nilai)	75,00
		8	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah I (%)	98,00
		9	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah I TA 2024 (%)	5,00

PK Revisi 1



NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah I	3.106.549.000
Total Anggaran Tahun 2025		3.106.549.000

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama
Direktur Wilayah I



Agus Joko Saptono

LAMPIRAN III

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Unit Organisasi Eselon II DIREKTORAT WILAYAH II



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rita**
Jabatan : Direktur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edy Junaedi**
Jabatan : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama

Direktur Wilayah II



Rita

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT WILAYAH II
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah II	1	Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah II berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90
		2	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah II (%)	90
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah II (%)	90
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II	4	Indeks kepuasan stakeholder atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah II (indeks)	3,4
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah II	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah II (nilai)	75
		7	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah II (%)	98
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah II TA 2024 (%)	5

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengawasan Berbasis Risiko di Wilayah II	1.599.990.000
2	Asistensi dan Evaluasi Realisasi Penanaman Modal di Wilayah II	3.772.050.000
3	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Penanaman Modal Wilayah II	1.954.651.000
Total Anggaran Tahun 2025		7.326.691.000

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama
Direktur Wilayah II



Rita

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Unit Organisasi Eselon II DIREKTORAT WILAYAH III



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT WILAYAH III

(REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Abdul Qodir**
Jabatan : Direktur Wilayah III

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edy Junaedi**
Jabatan : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama

Direktur Wilayah III



Abdul Qodir

PK Revisi 1

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT WILAYAH III
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
(REVISI 1)**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah III	1	Persentase capaian realisasi investasi berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi di Wilayah III (%)	90,00
		2	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berbasis risiko di Wilayah III (%)	90,00
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah III (%)	90,00
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III	4	Indeks kepuasan stakeholders atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah III (indeks)	3,40
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah III	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah III (nilai)	75,00
		7	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah III (%)	98,00
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah III TA 2024 (%)	5,00

PK Revisi 1



LAMPIRAN V

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Unit Organisasi Eselon DIREKTORAT WILAYAH IV



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTORAT WILAYAH IV

(REVISI 1)

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yos Harmen**
Jabatan : Direktur Wilayah IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edy Junaedi**
Jabatan : Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua

Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama

Direktur Wilayah IV



Yos Harmen

PK Revisi 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT WILAYAH IV
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
(REVISI 1)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah IV	1	Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah IV berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90,00
		2	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah IV (%)	90,00
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah IV (%)	90,00
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah IV	4	Indeks kepuasan stakeholders atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Direktorat Wilayah IV (indeks)	3,40
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah IV	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah IV (nilai)	75,00
		7	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah IV (%)	98,00
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah IV TA 2024 (%)	5,00

PK Revisi 1



NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah IV	1.708.448.000
Total Anggaran Tahun 2025		1.708.448.000

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama
Direktur Wilayah IV



Yos Harmen

PK Revisi 1

LAMPIRAN VI
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Unit Organisasi Eselon II

DIREKTORAT WILAYAH V



KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BKPM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT WILAYAH V

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ady Soegiharto**
Jabatan : **Direktur Wilayah V**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Edy Junaedi**
Jabatan : **Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 30 Desember 2024

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama
Direktur Wilayah V



Ady Soegiharto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT WILAYAH V
DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
(REVISI 1)

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terwujudnya pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal dan hilirisasi yang efektif di Wilayah V	1	Persentase capaian realisasi investasi di Wilayah V berdasarkan LKPM yang telah diverifikasi (%)	90,00
		2	Persentase pelaksanaan pengawasan perkembangan realisasi penanaman modal berusaha berbasis risiko di Wilayah V (%)	90,00
		3	Persentase fasilitasi perusahaan yang dapat terselesaikan permasalahannya di Wilayah V (%)	90,00
2	Meningkatnya kualitas layanan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V	4	Indeks kepuasan stakeholders atas pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Wilayah V (indeks)	3,70
3	Terwujudnya layanan dukungan manajemen yang baik lingkup Direktorat Wilayah V	5	Persentase rekomendasi evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang ditindaklanjuti (%)	80,00
		6	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) Direktorat Wilayah V (nilai)	75,00
		7	Persentase realisasi anggaran Direktorat Wilayah V (%)	98,00
		8	Persentase temuan BPK atas pelaksanaan anggaran Direktorat Wilayah V TA 2024 (%)	5,00

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Wilayah V	4.967.257.000
Total Anggaran Tahun 2025		4.967.257.000

Jakarta, 12 November 2025

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal



Edy Junaedi

Pihak Pertama
Direktur Wilayah V



Ady Soegiharto